



Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Simeulue

¹Dia Musfira, ²Safrida

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

¹diamusfirar@gmail.com, ²safrida1290@utu.ac.id

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5652

Received: 13 Januari 2022; Accepted: 10 Februari 2022; Published: 25 April 2022

Abstrak

Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok atau individu untuk menikmati keindahan suatu tempat. Dengan keberadaan pariwisata dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Ini penelitian dilakukan di Kabupaten Teupah Selatan pada Restorasi Mangrove dan Pusat Pembelajaran (PRPM) bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dalam pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Simeulue. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan telaah sumber pustaka seperti ilmiah jurnal, buku, dan laporan penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Pemerintah bertindak sebagai pendukung dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh tempat wisata dan masyarakat, sehingga pemerintah berperan peranan penting dalam pengembangan destinasi wisata di bidang infrastruktur, bidang lingkungan, jaringan dan kelistrikan. Kendala yang dialami oleh pemerintah adalah anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan destinasi wisata. Pada Pusat Pembelajaran dan Restorasi Mangrove (PRPM) perlu dilakukan pemerintah ulasan lebih lanjut tentang objek wisata ini, pemerintah dapat mengevaluasi kembali sehingga dapat difungsikan kembali sebagai destinasi wisata di Kabupaten Simeulue.

Kata kunci: Pariwisata; Ekonomi; Peran Pemerintah; Masyarakat.

Abstract

Tourism is a trip undertaken by a group or individual to enjoy the beauty of a place. With the existence of tourism can help the economy of the surrounding community. This research was conducted in Teupah Selatan District at the Mangrove Restoration and Learning Center (PRPM) aims to find out how the Government's role in the development of tourist destinations in Simeulue Regency. The data collection used is by means of observation, interviews, documentation and review of library sources such as scientific journals, books, and research reports. In addition, this study uses qualitative research using a case study approach. The government acts as a supporter and facilitates what is needed by tourist attractions and the community, so that the government plays an important role in the development of tourist destinations in the infrastructure, environmental, network and electricity sectors. The obstacle experienced by the government is the budget for the maintenance and development of tourist destinations. At the Mangrove Restoration and Learning Center (PRPM) the government needs to conduct a more review of this tourist attraction, the government can re-evaluate so that it can be re-enabled as a tourist destination in Simeulue Regency.

Keywords: *Tourism; Economy; The Role of Government; Society.*

PENDAHULUAN

Wisata pada dasarnya merupakan aktivitas yang berupa perjalanan yang dihasilkan oleh alam atau industri wisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud untuk rekreasi atau sebagai bentuk untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global (Makkasau et al., 2020). Wisata merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu pengembangan destinasi wisata yang baik sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga diperlukan peran dari pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata.

Pengelolaan destinasi wisata merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural (Sentanu & Mahadiansar, 2020). Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata adalah peran pemerintah baik dalam penyediaan infrastruktur, pengadaan fasilitas, adanya koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, kebijakan dan promosi wisata ke Daerah lain dan ke Luar Negeri. Menurut Kuncoro et al., (2019) Pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan karena adanya penerimaan Produk Domestik Bruto (PDB), dapat menciptakan lapangan kerja, sebagai penerima devisa, dan mampu mendorong kemajuan daerah yang ingin

mengembangkan bidang pariwisata. Pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya merupakan otonomi yang dimiliki daerah dalam peningkatan daerah yang maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif pembangunan daerahnya. UU Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Octastefani & Kusuma, (2015) pemerintah pusat memiliki wewenang penuh kepada daerah otonom dalam meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pengembangan destinasi wisata yang diusulkan berupa model pengembangan potensi wisata alam, mengacu pada kondisi aktual. Keterlibatan stakeholder seperti pemerintah/non pemerintah, SDM, program-program, dana dan fasilitas. Berdasarkan keterlibatan stakeholders dan kondisi wisata diharapkan tujuan dari program-program pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Simeulue dapat terarah ke depannya.

Kabupaten Simeulue adalah salah satu Kabupaten yang memiliki banyak destinasi wisata, ada sebanyak 40 objek wisata yang dapat dikunjungi terdapat di 10 Kecamatan, yang menyimpan banyak keindahan mulai dari Wisata Bahari Diving, Wisata Bahari Surfing, dan Wisata Alam. Kabupaten Simeulue merupakan Daerah yang cepat dalam pengembangan pariwastanya sehingga menjadi sektor yang unggul dalam perkembangan. Selain itu masyarakat Simeulue memanfaatkan dengan adanya destinasi wisata yang ada dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

Pantai yang menjadi sektor pariwisata utama di Kabupaten Simeulue menjadikan pantai sebagai sektor strategis dan berpotensi

untuk dikelola, dipasarkan, dan dikembangkan karena terbukti dengan jumlah pengunjung yang datang tidak hanya dalam Daerah saja, melainkan menarik pengunjung dari luar Daerah dan luar Negeri. Sehingga Pemerintah berperan penting untuk pengembangan destinasi wisata karena objek wisata pantai di Kabupaten Simeulue sangat diminati dan tertarik untuk di eksplor oleh pengunjung wisata. Namun selama ini, semua objek wisata tersebut belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah, kurang optimalnya pengelolaan terhadap destinasi wisata tentu akan berpengaruh pada jumlah wisatawan.

Penelitian dan analisis hubungan kolaboratif sektor publik dan sektor swasta dalam perkembangan destinasi wisata Hermawan, (2017). Mencakup pariwisata pada kenyataan yang lebih kompleks, karena bersifat penuh tanggung jawab dalam pengembangannya, seperti ilustrasi pada uraian berikut:

1. Sektor swasta, yang dimaksud dengan sektor swasta yaitu mereka yang berperan sebagai penghasil utama atau pemasok barang dan jasa yang akan dikonsumsi atau dijual belikan kepada pengunjung, berupa keragaman unit ekonomi seperti usaha mikro kecil menengah baik secara tradisional, lokal, dan regional. Terdiri dari berbagai kegiatan manufaktur, perdagangan transportasi (resort/tempat penginapan, layanan makan dan minum, rekreasi, kegiatan budaya, dll).
2. Sektor publik, yang dimaksud dengan sektor publik yaitu suatu kegiatan dalam bidang tertentu dalam mempengaruhi bagaimana suatu objek wisata dapat dikembangkan di Negara atau wilayah seperti pengembangan infrastruktur, kebijakan transportasi,

perencanaan dan didampingi dengan adanya aktor dan agen (eksekutif dan legislatif) sebagai pemeran dalam pengembangan pariwisata.

Perencanaan pengembangan pariwisata yang multi aspek dan multi sektor serta multi wilayah yang membutuhkan perencanaan secara kolaboratif yang terintegratif baik secara hirarki (Kabupaten, Kota dan Provinsi) maupun pada lembaga dan kementerian. Untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini maka berfokus pada Peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Simeulue, berdasarkan teori menurut Mahardhani, (2014) yang dilihat dari unsur pengembangan pariwisata berdasarkan; daya tarik, transportasi, akomodasi, fasilitas pelayanan dan pelayanan fasilitas, dan tersedianya infrastruktur yang memadai.

Kecamatan Teupah Selatan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki tujuh tempat wisata yang terdapat di beberapa desa, kecamatan ini dikelilingi oleh tepian pantai baik Wisata Bahari Diving, Wisata Bahari Surfing, dan Wisata Alam yang menjadi objek wisata yang dapat menarik pengunjung, sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Objek wisata yang berada di Kecamatan Teupah Selatan ini menjadi tempat wisata yang berpotensi untuk dikembangkan dan untuk mendukung perkembangannya perlu adanya peran dari pemerintah untuk dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Kubickova (2016) mengatakan pemerintah berperan penting dalam pariwisata untuk meningkatkan daya saing suatu objek wisata yang berkualitas. Dengan banyaknya wisatawan yang mengunjungi tempat wisata maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangannya akan tetapi dari penelitian melihat peran pemerintah yang belum maksimal dalam pengembangan destinasi wisata yang

lebih baik lagi. Dapat dilihat dari peran pemerintah dalam menjaga dan melestarikan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) atau biasa disebut jembatan merah yang ada di Desa Labuan Bakti kawasan wisatanya yang terbengkalai, pemeliharaan dan penjagaannya. Infrastruktur yang belum memadai jalan menuju kawasan wisata pantai Ujung Balla yang ada di Desa Pulau Bangkalak, penyediaan jaringan komunikasi dan listrik fasilitas pelayanan dan pelayanan fasilitas yang memadai juga belum ada di destinasi wisata yang berada di Kecamatan Teupah Selatan.

Oleh sebab itu dari hasil penelitian, berdasarkan pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Teupah Selatan maka peran dari Pemerintah Daerah belum begitu maksimal, jika dilihat dari kriteria dalam pengembangan Pariwisata. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Simeulue (Studi Kasus PRPM di Kecamatan Teupah Selatan).

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan jenis pendekatan Studi Kasus. Menurut Arikunto (2006) menjelaskan bahwa pada pendekatan studi kasus ini menjadi salah satu jenis pendekatan yang mendeskripsikan dan menggambarkan suatu objek untuk mengumpulkan data, penelitian ini dilakukan secara terperinci untuk mengetahui suatu organisasi, lembaga atau tentang daerah secara sempit. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Simeulue, fokusnya di Kecamatan Teupah Selatan. Raco, (2010) mengatakan bahwa ada 3 langkah yang dapat dirangkum dalam penelitian kualitatif yaitu dengan pertanyaan, wawancara, menyajikan jawaban data dan informasi yang sudah ada

dianalisis dengan benar. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta telaah terhadap sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku-buku, dan laporan penelitian.

Analisis data penelitian ini merupakan model kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sehingga data yang dikumpulkan diuji kebenarannya dengan cara mengklasifikasi dan menganalisis pengimplementasiannya, lalu menguji kenyataannya dengan sumber dilapangan dan metode wawancara. Kesimpulan disesuaikan dengan verifikasi dengan kajian dan data yang ditemukan selama melakukan penelitian.

Dalam menjalankan peranannya pemerintah daerah bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya. Menurut Poerwadarminta, (Windasai et al., 2021) yang dimaksud dengan peran ialah bagaimana perilaku dari individu atau kelompok pada suatu peristiwa tertentu, dimana sikap dari individu atau kelompok tersebut diharapkan dapat mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu dalam tatanan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simeulue melakukan studi kasus di Kecamatan Teupah Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Asmanuddin, SH.MH selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dr. Rina Darma Surya, ST.MT Kepala Bidang P2ESDA (BAPPEDA), Dedi Devayan selaku Camat Kecamatan Teupah Selatan, Kepala Desa Labuhan Bakti dan Kepala Desa Pulau Bangkalak sebagai informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan suatu objek yang sangat berpotensi dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, seperti halnya pada sektor ekonomi, budaya, dan kearifan lokal pada masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang baik dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah,

sehingga Pemerintah sangat berperan dalam pengembangan atau pengelolaan wisata. Menurut Ruhanen (2013:92) dalam Penelitian (Sentanu & Mahadiansar, 2020) mengatakan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan perkembangan pada sektor pariwisata kedepannya untuk mencapai tujuan dari pemerintah pusat.

Kabupaten Simeulue merupakan wisata alam yang mempunyai kekayaan wisata yang menawan dan indah, dikelilingi oleh pulau-pulau kecil yang membuat Kabupaten Simeulue menjadi pulau yang mempunyai pulau-pulau kecil yang indah dan sangat diincar oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Pulau simeulue merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang ada di Provinsi Aceh, selain itu Simeulue terkenal dengan wisata andalan yaitu pantai yang mempunyai ombak cukup bagus untuk berselancar (surfing) mengundang para wisatawan luar untuk datang dan mengunjungi tempat wisata yang ada di Simeulue.

Peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Simeulue menjadi wisata yang lebih maju dan dapat mensejahterakan masyarakat salah satunya pada sektor pembangunan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan dan pembangunan jembatan. Pada sektor pembangunan tower listrik yang menggunakan proses digitalisasi dan mendukung dalam sektor kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengatakan bahwa " dalam menjalankan tugas pemerintah pada pengembangan destinasi wisata, pemerintah berperan sebagai pendukung dan memfasilitasi apa yang diperlukan oleh tempat wisata dan masyarakat, sehingga pemerintah berperan penting dalam pengembangan destinasi wisata" oleh karena itu pemerintah

merupakan bagian yang dapat membuat destinasi wisata di suatu daerah dapat maju dan berkembang dengan baik sebab adanya dukungan dari Pemerintah Daerah. Pada hakikatnya pengembangan pariwisata dapat terlaksana dengan baik jika sumber daya yang mendukung tidak terhambat karena ada hal-hal politik didalamnya. Sumber daya yang dimaksud meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang berpengaruh pada keberhasilan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi, pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sendiri terdapat pegawai yang yang memiliki bidang keilmuan bukan bidang pariwisata , Sumber Daya Anggaran merupakan sumber yang dapat mengukur keberhasilan dalam implementasi kebijakan, serta dapat menyebabkan program dari pemerintah tidak berjalan dengan optimal, Sumber Daya Peralatan merupakan sarana prasarana yang dapat digunakan sebagai operasinalisasi dalam suatu program pemerintah dan Sumber Daya Kewenangan merupakan sumber daya yang sangat penting karena dengan adanya keputusan dari pemerintah maka dapat terbentuknya suatu program dalam pengembangan destinasi wisata.

Hambatan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pengelolaan yang memadai dapat membuat suatu daerah sejahterah karena adanya kerja sama dan saling membantu antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada tempat wisata yang terbengkalai dan akses menuju tempat wisata pun bisa dilalui oleh wisatawan.

Namun dalam melakukan proses pengembangan destinasi wisata Pemerintah Kabupaten Simeulue masih mengalami kendala dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai salah satu yang berperan penting dalam pengembangan destinasi wisata.

Seperti pada proses yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor pengembangan yang paling berpengaruh yaitu anggaran dana pemeliharaan dan pengembangan destinasi wisata.

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Infrastruktur, Penerangan, dan Lingkungan

Infrastruktur merupakan faktor yang penting dalam pariwisata, karena menyangkut pengembangan wisata seperti, hotel, jalan, jembatan, pelabuhan, alat-alat transportasi, bandara dan lainnya yang masih kurang pada daerah. Kabupaten Simeulue masih sangat ketinggalan akses atau transportasi, baik akses darat, akses laut dan akses udara yang masih kurang untuk menuju Kabupaten Simeulue. Selain itu akses menuju antar pulau yang ada di Kabupaten Simeulue masih minim, jika ingin berwisata ke pulau-pulau kecil wisatawan harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk bisa menikmati wisata alam di Pulau Simeulue.

Desa Labuan Bakti Kecamatan Teupah Selatan terdapat sebuah objek wisata yaitu Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove atau yang biasa disebut Jembatan Merah yang di bangun sejak tahun 2015, destinasi wisata ini merupakan kawasan hutan mangrove. Pemerintah Kabupaten Simeulue membangun jembatan ini selain menjadi objek wisata, jembatan ini juga di bangun untuk mencegah perambahan hutan mangrove di bibir pantai, yang bertujuan untuk menjadi Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) Simeulue. PRPM tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. Pembangunan PRPM ini menghabiskan biaya anggaran kurang lebih

Rp 2 Miliar, jembatan merah memiliki panjang 1000 M terbuat dari material kayu, yang menembus hutan bakau dan rawa-rawa, selain itu disebelah kiri jembatan terdapat Kantor PRPM yang yang terbuat dari material kayu.



Gambar 1. PRPM/Jembatan Merah

Jembatan merah sangat populer pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat mendatangkan pengunjung sebanyak 500-1000 pengunjung pertahunnya, selain itu kawasan hutan mangrove ini berdampingan dengan pantai Thailand sehingga kawasan wisata alam ini sangat berpotensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata di Kecamatan Teupah Selatan. namun demikian karena tidak adanya pemeliharaan terhadap destinasi wisata ini, maka destinasi wisata ini terbengkalai tak terurus. Akses menuju tempat wisata ini sangat sulit dilalui karena belum adanya pembuatan jalan di daerah tersebut, selain itu penerangan pun belum terjangkau di objek wisata itu sehingga membuat daerah tersebut sangat sunyi tidak ada pengunjung lagi, kantor PRPM yang berada di lokasi wisata itu pun sudah sangat memprihatinkan karena beberapa material bangunan sudah lapuk, rusak, dan hilang.



Gambar 2. Jalan menuju lokasi wisata



Gambar 3. Kantor PRPM

Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Objek Wisata

Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalami beberapa hambatan dalam pengembangan destinasi wisata. Pendanaan adalah anggaran operasional yang digunakan dalam pembangunan suatu objek wisata, dalam penelitian Zuniandi Robby (2021) mengatakan bahwa anggaran merupakan suatu pencapaian pemikiran dalam pekerjaan yang hendak dicapai pada periode tertentu dalam bentuk ukuran berupa financial. Tahap penganggaran sangat penting untuk menjamin keefektifan membangun suatu tempat dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, selain itu anggaran juga dapat tidak efektif berorientasi dan dapat menggagalkan suatu

kinerja dalam perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

Dari keterangan yang didapatkan peneliti bahwa Kabupaten Simeulue setiap tahunnya mempunyai anggaran dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Simeulue, pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Simeulue mempunyai program kerja pada sektor Pariwisata dan kebudayaan. Selain itu adanya Covid-19 dua tahun terakhir ini membuat pendapatan daerah menurun seperti sudah tidak adanya wisatawan mancanegara yang bisa masuk untuk berwisata di Simeulue, membuat pengelola Resort atau Homestay yang ada di Kabupaten Simeulue mengalami kerugian dan tidak dapat beroperasi seperti biasa.

Selain itu dari sisi legalitas di Kabupaten Simeulue masih banyak dari pelaku usaha yang masih belum memiliki surat izin usaha, pengusaha yang memiliki resort, hotel, restoran masih menggunakan izin usaha yang lama sedangkan pada saat ini pengusaha harus memiliki izin usaha yang memiliki sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) sehingga pemerintah tidak menjamin pengusaha tidak mendapatkan dana insentif dan dana hiba dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah karena tidak memenuhi syarat penerimaan dana tersebut.

Selanjutnya pengusaha wajib bayar pajak, tetapi di Kabupaten Simeulue para pengusaha resort, hotel, dan restoran masih tidak taat pajak setiap pengelola hotel atau restoran membayar pajak sebesar 10% dari hasil pengelolaan kepada Pemerintah Pusat, selain itu pengusaha juga tidak menaati pembayaran pajak penghasilan kepada daerah, sehingga hal ini menyebabkan pelaku usaha di Kabupaten Simeulue tidak mendapatkan dana insentif dan dana hiba dari pemerintah.

Hambatan Pemerintah Daerah dalam proses pengembangan dan pemeliharaan wisata yang ada di Kecamatan Teupah Selatan

adalah terkendala terhadap anggaran dalam bidang pengembangan infrastruktur maupun lingkungan. Menurut Sutisna (2006:9) pada penelitian (Lestari & Firdausi, 2017) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai empat indikator meliputi ekonomi kesejahteraan, lingkungan berkelanjutan, keadilan sosial, lingkungan hidup yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur secara sederhana yang dapat dipakai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menilai kesuksesan seorang pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi daya tarik wisatawan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan sebagai peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata (Sawir & Pende, 2020). pada kawasan PRPM sendiri dari hasil wawancara di BAPPEDA Kabupaten Simeulue bahwa program PRPM atau wisata jembatan merah belum diserahkan hak pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah, hasil wawancara dengan Camat Teupah Selatan bahwa objek wisata PRPM ini sudah diserahkan Dinas Perikanan dan Kelautan kepada kelompok masyarakat desa setempat, Sehingga pemerintah tidak bisa melakukan pemeliharaan wisata, akibatnya selama empat tahun wisata hutan mangrove terbengkalai dan tidak terurus. Amirudin, (2017) menyatakan peraturan pemerintah mengenai kewenangan untuk menjalani koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Desa dan para kelompok sadar wisata untuk mengembang kembali objek wisata yang terbengkalai. Namun pada Desember sampai januari pemerintah akan melakukan pendataan dan evaluasi terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Simeulue, pemerintah akan melihat objek wisata yang masih dapat difungsikan dan mempunyai potensi besar dalam pengembangan pariwisata, maka akan

menjadi prioritas pemerintah dalam mendanai pemeliharaan objek wisata tersebut.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Simeulue meliputi sektor infrastruktur, kebersihan, dan listrik. Tetapi di beberapa objek wisata aksesibilitasnya belum memenuhi standar pembangunan, selain itu di sektor kebersihan Daerah Kecamatan Teupah Selatan merupakan tempat wisata yang belum memiliki kontainer sampah sebagai tempat pembuangan sampah baik sampah dari pelaku usaha maupun sampah dari wisatawan, penyediaan jaringan komunikasi dan pengadaan aliran listrik juga menjadi peranan pemerintah, dalam mendukung kinerja pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam pembangunan listrik dan jaringan yang masih belum tersedia di beberapa objek wisata yang ada di Kecamatan Teupah Selatan.

Pada Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) pemerintah perlu melakukan peninjauan lebih terhadap objek wisata ini, dilihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan kawasan wisata hutan mangrove ini sangat berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki keindahan tersendiri pada objek wisata ini, pemerintah dapat mengevaluasi kembali agar dapat difungsikan kembali sebagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Simeulue.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A. (2017). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata di Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovations*, 2(1), 26–32.
- Hermawan, H. (2017). Pengembangan Destinasi Wisata pada Tingkat Tapak Lahan dengan Pendekatan Analisis SWOT. 4(2), 64–74. <https://doi.org/10.31219/osf.io/e783t>

- Kubickova, M. (2016). The Role of Government in Tourism: Linking Competitiveness, Freedom, and Developing Economies. *Czech Journal of Tourism*, 5(2), 73-92. <https://doi.org/10.1515/cjot-2016>
- Kuncoro, B., Nugaraha, J. tri, & Ahsani, R. D. (2019). Pengembangan Potensi Destinasi Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(2), 82-93. <http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1967>
- Lestari, A. W., & Firdausi, F. (2017). Peran Pemerintah Kota Batu Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(3), 260-265. <https://doi.org/10.20473/mkp.V30I32017.260-265>
- Mahardhani, A. J. (2014). Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Pengembangan Kawasan Selingkar Wilis. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 1(1), <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i1.284>
- Makkasau, N., Maru, R., & Nyompa, S. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Camba-cambang Kabupaten Pangkep. *UNM Geographic Journal*, 3(2), 167-174. <https://doi.org/10.26858/ugj.v3i2.22852>
- Octastefani, T., & Kusuma, B. M. A. (2015). Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.185>
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Sawir, M., & Pende, H. H. (2020). Peran Pemerintah Desa Lalos Dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga. *Tol/s Ilmiah Jurnal Penelitian*, 2(1), 43-48.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar. (2020). Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1-20.
- Windasai, Mas'ud, S. M. &, & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 12.
- Zuniandi, Robby. (2021). Politik anggaran dan pengelolaan retribusi pada objek wisata di aceh selatan. *Jurnal Inovetera*, 1(1), 71.